

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dengan adanya penetapan pemerintah UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola dana desa secara mandiri dan mengembangkan potensinya guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. pengelolaan keuangan tidak terlepas dari akuntabilitas. secara umum akuntabilitas diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggung jawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan operasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan untuk periode - periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik (Mustofa, 2012).

Permendagri 113 Tahun 2014 menjelaskan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. Ada pula asa pengelolaan keuangan desa sebagai berikut :

1. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas - asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
2. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember .

Akuntabilitas yang efektif dapat terwujud apabila informasi yang di sampaikan mudah untuk dipahami. Masyarakat sebagai pihak yang member kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasmo, 2007). Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi

berhak untuk menuntut pertanggung jawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Halim, 2007).

Aksesibilitas dapat diartikan sebagai sarana pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada publik secara terbuka dan jujur berupa laporan keuangan yang dapat di akses dengan mudah oleh berbagai pihak yang berkepentingan (Mustofa, 2012). Permandagri 113 Pasal 40 menyatakan laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBD Desa wajib di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat media informasi sebagaimana yang dimaksud antara lain pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pengendalian internal merupakan sistem atau prosedur yang ada dalam suatu organisasi untuk menjaga proses kegiatan operasi sesuai dengan kebijakan yang telah di tetapkan guna pencapaian tujuan organisasi itu sendiri. Menurut Krismiaji (2010, 218) menyebutkan bahwa pengendalian internal adalah rancangan organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

Penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa masih tergolong baru. Salah satu penelitian terkait akuntabilitas pengelolaan akuntabilitas keuangan desa yaitu, Ibnu Wardana (2016) hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa,

pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Namun penelitian serupa dilakukan di sektor publik (daerah), seperti penelitian Riyansa, dkk (2015) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah sedangkan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Yusrianti, dkk (2013) menyatakan bahwa pengukapan laporan keuangan neraca daerah dan aksesibilitas pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sari (2014), menyatakan bahwa sistem pengendalian intern, sistem akuntansi keuangan daerah dan penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ibnu Wardana (2016), perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian. Objek penelitian Ibnu Wardana (2016) di Desa Kabupaten Magelang sedangkan penelitian ini di Desa Kabupaten Kampar.

Kabupaten Kampar dijadikan objek penelitian karena, di kutip dari merdeka.com (2016), camat di Kecamatan Kampar Utara di duga melakukan penyelewengan dana desa. Data di Mapolda Riau Menyebutkan, kejadian bermula sewaktu 4 desa di kecamatan tersebut menerima dana desa dari APBN pada tahun 2015 dengan jumlah bervariasi. Dana itu di transfer ke rekening Bank Riau Kepri. Selanjutnya, Camat mengalihkan dana itu ke rekening pribadinya dengan

jumlah Rp. 628 juta lebih. Dana desa itu digunakan oleh Camat membangun semenisasi dan pengerukan irigrasi desa-desa di kecamatan tersebut. Namun, kegiatan itu diduga dilakukan camat tersebut tanpa mekanisme pengelolaan dana desa sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Uang Desa. Perbuatan camat itu, sebagaimana terdapat dalam laporan kepolisian, juga melanggar Peraturan Bupati Kampar Nomor 12 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam kedua aturan tersebut disebutkan, pengelolaan keuangan atau kegiatan dana desa harus melalui penunjukan pelaksana kegiatan dan melibatkan perangkat desa. di samping itu camat tersebut dalam mengelola dana tersebut tidak melibatkan bendahara desa.

Fenomena yang terjadi ialah ketidak patuhan perangkat desa dan kurangnya pengetahuan dalam mengelola dana desa yang dapat menjerat kepala desa dalam hukum. Serta berdasarkan dari penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil yang tidak konsisten, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kampar.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?

2. Bagaimana pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?
3. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?
4. Bagaimana pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, maka tujuan penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
- d. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagi Penulis, sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta memperkuat bukti empiris mengenai ilmu yang sedang diteliti khususnya mengenai Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.
- b. Bagi Institusi tempat penelitian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi aparat Desa di Kabupaten Kampar, baik berupa masukan ataupun pertimbangan terkait dengan Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.
- c. Bagi Peneliti lain, diarpakan sebagai rujukan untuk penelitian yang terkait dengan Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

### D. Sistematika Penulisan

Untuk menggambarkan secara garis besar batas dan luasnya penulisan penulis membagi proposal ini menjadi 6 bab, yaitu sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

Berisi tentang landasan teori dan pengembangan hipotesis, menjelaskan mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini meliputi objek penelitian dan penentuan sampel, jenis dan sumber data, spesifikasi variabel alat pengukuran dan penyajian hipotesis.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang sejarah singkat pemerintah daerah Kabupaten Kampar, letak geografis, organisasi dan tata kerja desa di Kabupaten Kampar.

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan serta menjelaskan hasil pengujian hipotesis.

**BAB VI : PENUTUP**

Merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan yang ditarik oleh penulis dalam berbagai saran-saran untuk masa yang akan datang.